

# **IMPLEMENTASI PROGRAM JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK) OLEH DINAS KESEHATAN DI KELURAHAN SUKAMANAH KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA**

**Yuneu Salsabila**

*Universitas galuh, ciamis, Indonesia*

E-mail : yuneusalsabial@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Sejak September 2020 Kota Tasikmalaya mengalami kejadian luar biasa akibat demam berdarah dengue, tercatat 1.214 orang terjangkit demam berdarah dengue dan 20 diantaranya meninggal dunia. Di awali kejadian ini pemerintah Kota Tasikmalaya membuat kebijakan yaitu Program Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) dan diimplementasikan di Kota Tasikmalaya. Program Jumantik ini bertujuan untuk penanggulangan dan pencegahan perkembangbiakan jentik hingga mencapai angka bebas jentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Implementasi Program Jumantik di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Dilihat dari kinerja implementasi Jumantik dari 6 dimensi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas para pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif , teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Program Jumantik yaitu studi kepustakaan yang terdiri studi literature dan dokumentasi dan dari studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian Program Jumantik sebanyak 5 (lima) orang. Hasil dari penelitian Program Jumantik masih ada hambatan yang terjadi yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk pemantaua jentik secara berkala dan keteterlambatan waktu dalam melaporkan hasil pemantauan jentik. Upaya yang dilakukan agar Program Jumantik dapat berjalan secara efektif dan efesien setiap masyarakat harus melaporkan hasil pemantauan tiap mingguan melalui Whatsapp dan jika ditemukan jentik maka kader akan langsung memeriksa ke rumahnya.*

**Kata Kunci :** *Implementasi , Program Jumantik, Dinas Kesehatan*

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini dilakukan karena di Kota Tasikmalaya meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue dan

mengetahui pelaksanaan Program Jumantik sebagai salah satu penanggulangan dan pencegahan DBD. Demam Berdarah Dengue adalah

salah satu penyakit akibat infeksi virus yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan aedes albopictus. Maka dari itu Demam Berdarah Dengue menjadi salah satu masalah di Indonesia, karena dalam setiap tahunnya jumlah yang terinfeksi dan terjangkit oleh virus Dengue ini terus meningkat, selain jumlah yang terinfeksi, akibat dari DBD ini juga ikut meningkat. Dengan demikian kesadaran masyarakat sangatlah penting untuk pencegahan dan penanggulangan. Agar jumlah yang terinfeksi dan angka kematian ikut menurun. Salah satu yang harus disadari dan diperhatikan adalah pola hidup yang sehat dan perhatikan kebersihan lingkungan sekitar sebagai bentuk pencegahan. Kota Tasikmalaya di tahun 2020 tercatat mencapai 1.214 kasus Demam Berdarah Dengue hingga September 2020, 20 orang diantaranya berakhir meninggal dunia yang mana kasus Demam Berdarah Dengue ini kebanyakan menyerang anak dibawah 15 tahun.

Undang-Undang tentang DBD tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang mana bunyi dari UU RI nomor 4 tahun 1984 Pasal 5 Ayat (1) “Upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu:

1. Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan.
2. Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar

penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.”

Darurat akan Demam Berdarah Dengue ini maka dari itu Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan kebijakan yaitu penerapan Program Jumantik (Juru Pemantau Jentik) atau sering disebut juga Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Program ini dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat dengan melibatkan Puskesmas sebagai pihak yang memberikan pengarahan kepada masyarakat, dan Kelurahan sebagai pihak yang mengetahui bahwa masyarakat sedang melaksanakan suatu kebijakan yaitu Program Juru Pemantau Jentik. Salah satu PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) yaitu dengan melakukan 3M Plus yaitu :

1. Menguras, adalah bentuk kegiatan membersihkan tempat penampungan air yang mana jentik dapat berkembang biak dengan cepat di dalam air yang tidak diganti atau didalam air yang dibiarkan begitu saja.
2. Menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti toren, drum, kendi, dan lain-lain.
3. Memanfaatkan Kembali atau mendaur ulang barang-barang yang masih layak digunakan, jangan biarkan barang-barang dirumah menumpuk yang mana mengakibatkan nyamuk berkeliaran

Sedangkan Plusnya diantaranya yaitu :

1. Menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan
2. Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk
3. Menggunakan kelambu saat tidur
4. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk
5. Menanam tanaman pengusir nyamuk
6. Mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah
7. Menghindari menggantungkan pakaian di dalam rumah yang mana bisa menjadikan tempat nyamuk singgah.

Dengan diimplementasikannya suatu kebijakan maka masalah-masalah yang terjadi bisa di atasi. Pengaruh Kinerja Implementasi menurut Van Horn dan Van Metter terdiri dari 6 (enam) dimensi diantaranya adalah : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas para pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, dan lingkungan ekonomi sosial dan politik.

Dalam pelaksanaan Program Jumantik di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya optimal, adanya hambatan dalam pelaksanaan diantaranya yaitu :

1. Kurangnya sumber daya manusia, tercatat dalam aturan satu orang kader untuk memantau 20 rumah, sedangkan di

Kelurahan Sukamah 2-3 orang untuk satu RW.

2. Masyarakat sering terlambat dalam melaporkan hasil pemantauan jentik yang

Dilihat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Jumantik oleh Dinas Kesehatan di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Jumantik oleh Dinas Kesehatan di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis  
Kegunaan teoritis dari hasil penelitian dapat bermanfaat yaitu Mengetahui Implementasi Program Jumantik oleh Dinas Kesehatan
2. Kegunaan Secara Praktis  
Kegunaan praktis dari hasil penelitian dapat bermanfaat :
  - a. Bagi Penulis  
Dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang bagaimana implementasi Program Jumantik sebagai kebijakan publik oleh Dinas Kesehatan
  - b. Bagi Dinas Kesehatan  
Mengetahui sejauh mana perubahan Program Jumantik

setelah diimplementasikan di Kota Tasikmalaya

c. Bagi Kader Jumantik

Memberikan wawasan serta pemahaman baru dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Program Jumantik sehingga dapat diterapkan kepada masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Dapat melaksanakan Program Jumantik sesuai dengan peraturan dan pengarahannya yang dibuat oleh Dinas Kesehatan.

kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Implementasi adalah bagaimana proses kebijakan itu berlangsung yang mana sudah ditetapkan dan disepakati oleh kelompok pemerintah atau swasta sehingga dapat menghasilkan pencapaian.

Ada enam variable / dimensi menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakannya memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai

## KAJIAN PUSTAKA

Pengertian kebijakan publik sebagaimana menurut Anderson (1990: 3) bahwa “kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.”

Kebijakan publik dilaksanakan untuk menyelesaikan atau memberikan solusi dari masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu untuk menjadi lebih baik sehingga tidak ada penyimpangan atau pelanggaran bagi yang melaksanakan kebijakan tersebut dalam suatu kelompok atau organisasi.

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab2006:65) mengatakan bahwa “implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau

dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber day aitu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula hal nya dengan sumber daya waktu. Taat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan suatu implementasi kebijaka.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksanaan meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlihat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang teapt serta cocok dengan para agen pelaksananya. Dalam pelaksanaan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan, selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu

diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana, semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

### 4. Sikap atau Kecenderungan (dispotion) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal bentuk persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan,atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

### 5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat ke cil terjadi ; dan begitu pula sebaliknya.

### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam presfektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Jumantik adalah salah satu Program Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi resiko akibat dari nyamuk, yang mana didalamnya bertujuan untuk pemberantasan dan penanggulangan bagaimana cara menghindari terjadinya Demam Berdarah Dengue akibat Nyamuk. Penggerak Program Jumantik ini yaitu kader, yang mana kader memiliki peran sebagai penanggung jawab terhadap masyarakat yang sudah diberi pengarahan tentang bagaimana pelaksanaan Program Jumantik ini.

Kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) adalah kelompok kerja kegiatan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue di tingkat Kelurahan dalam wadah Lembaga Ketahann Masyarakat Kelurahan (Depkes RI, 2005).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode

kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif maka metode yang akan ditempuh yaitu metode penelitian deskriptif yang mana metode ini bertujuan untuk menyajikan mengenai setting sosial atau yang dimaksud yaitu untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sukunder.

Untuk memperoleh data dari sumber data tersebut maka dalam penelitian teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Studi Kepustakaan, yang terdiri dari studi litelature dan dokumentasi.
- b. Studi Lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Menurut Miles dan Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data/Pengolahan Data
3. Verifikasi atau Penyimpulan Data

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui implementasi Program Jumantikn oleh Dinas Kesehatan di Kelurahan Sukamanah maka dilakukanlah observasi, dokumentasi dan wawancara dari 5 informan, berikut hasil penelitian :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa ukuran

dan tujuan kebijakan dalam implementasi Program Jumantik telah memiliki standar operasional prosedur sebagai salah satu ketentuan dalam kebijakan dan sudah diimplementasikan kepada masyarakat di Kelurahan Sukamanah, selain itu adanya petunjuk pelaksanaan sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan melalui pembinaan dan akan disampaikan kepada masyarakat di Kelurahan Sukamanah oleh kader, selanjutnya adalah tujuan dari Program Jumantik untuk pemberantasan sarang nyamuk dan mencapai angka bebas jentik adalah bentuk penanggulangan dan pencegahan dari demam berdarah.

Program Jumantik ini memiliki ukuran kebijakan yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, hasil yang diharapkan dalam ukuran kebijakan dilakukan secara perlahan mengubah bagaimana Program Jumantik ini dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu kejelasan dalam tujuan Program Jumantik adalah untuk kepentingan bersama dan relevan, maka dari itu mengenai Implementasi Program Jumantik dalam ukuran dan tujuan Program Jumantik sudah optimal.

## 2. Sumber – Sumber Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian sumber-sumber kebijakan dalam implementasi Program Jumantik yaitu sumber daya manusia yang masih kurang jumlahnya dan tidak sesuai dengan aturan dari Dinas Kesehatan sehingga dapat menghambat implementasi. Jumlah yang

dibutuhkan dalam pemantauan jentik yaitu satu orang untuk memantau 20 rumah, akan tetap karena kurangnya sumber daya manusia menjadi 1-2 orang untuk satu RW. Sumber daya waktu dalam Program Jumantik sudah ditetapkan waktu pemantauan yaitu satu minggu satu kali dengan memberikan laporan kepada kader jumantik dan setelah itu kader melaporkan ke puskesmas, selain itu masih ada saja masyarakat tidak melaporkan hasil pemantauannya tepat waktu, dan menghambat kinerja kader. Selain itu ada sumber daya finansial yang mana anggaran yang dikeluarkan untuk Program Jumantik yaitu alat-alat yang digunakan kader untuk memantau jentik, larvasida, dan melakukan fogging jika diperlukan. upaya yang dilakukan untuk mengaktifkan waktu yaitu masyarakat boleh melaporkan pemantauan jentik via Whatsapp.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik agen pelaksana pada tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dilakukan secara konsisten untuk menjaga kestabilan dari angka bebas jentik, selanjutnya dalam pelaksanaan kompetensi Program Jumantik tidak dilakukan karena kebijakan ini berlaku untuk semua kalangan di masyarakat di Kelurahan Sukamanah sehingga bentuk kompetensi dalam Program Jumantik yaitu dengan memberikan laporan tepat waktu dan adanya kesadaran yang tumbuh di masyarakat, selanjutnya itu keterlibatan antara pembuat kebijakan

dengan para pelaksana hanya untuk dua pihak yaitu Dinas Kesehatan sebagai pembuat keputusan dalam Program Jumantik dan dikoordinasikan kepada Puskesmas setempat. Implementasi Program Jumantik di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya sudah Optimal.

#### 4. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Para Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, yang terkait komunikasi dan aktivitas para pelaksana teknis yaitu komunikasi dilakukan ketika adanya informasi yang harus disampaikan atau diterima antara dinas Kesehatan dan para pelaksana lainnya selain itu bentuk komunikasi lainnya adalah memberikan saran dan bantuan yang mana dalam Program Jumantik di dalamnya terdapat saran tentang tata cara yang harus dilakukan untuk pemberantasan sarang nyamuk, dan bantuan yang dilakukan dalam Program Jumantik. Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas para pelaksana dalam Implementasi Program Jumantik di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya sudah optimal

#### 5. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dilihat dari tiga indikator sikap para pelaksana adalah para pelaksana memiliki kemampuan yang baik dan Program Jumantik dari laporan yang diterima setiap bulannya selalu ada perubahan terkait angka jentik yang ditemukan

semakin berkurang, itu artinya para pelaksana berhasil memberikan pengaruh terhadap masyarakat sehingga masyarakat mau berpartisipasi dalam menjalankan Program Jumantik, selanjutnya perjanjian dalam kebijakan Program Jumantik tidak tertulis dalam standar operasional prosedur, maka dari itu tidak ada perjanjian secara khusus karena kebijakan ini diimplementasikan kepada masyarakat sebagai solusi penanggulangan demam berdarah, selanjutnya adalah para pelaksana yang kompeten, setiap pelaksana memiliki perannya masing-masing dalam proses jumantik ini berjalan, maka dari itu para pelaksana melakukan tugasnya sesuai dengan skill dan perannya. Para pelaksana yang mempengaruhi masyarakat sehingga tingkat kesadaran masyarakat meningkat adalah salah satu perkembangan suatu kebijakan yang baik. Maka dari itu sikap atau kecenderungan para pelaksana sudah optimal.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dari Hasil penelitian lingkungan ekonomi, sosial dan politik memberikan dukungan sehingga tidak ada gugatan atau penolakan tentang Program Jumantik ini dilaksanakan, selanjutnya dukungan masyarakat terhadap Program Jumantik adalah ada kemauan berpartisipasi dan membuat perubahan di Kelurahan Sukamanah, selanjutnya yaitu partisipasi lingkungan masyarakat di Kelurahan Sukamanah dengan melakukan gotong royong

secara rutin untuk menjadikan lingkungan di Kelurahan Sukamanah lebih bersih dan asri.

Dalam implementasi Program dalam Implementasi Program Jumantik di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya sudah optimal.

### **KESIMPULAN**

Program Jumantik sudah diimplementasikan di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Program Jumantik mendapat dukungan dan partisipasi di masyarakat Kelurahan Sukamanah, dalam proses pelaksanaan Program Jumantik dari waktu ke waktu memberikan perubahan dimana ada peningkatan dalam pencapaian angka bebas jentik (ABJ).

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses implementasi yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk pemantauan jentik secara berkala dan sumber daya waktu dalam keterlambatan memberikan hasil pemantauan dari masyarakat. Upaya yang dilakukan agar Program Jumantik dapat berjalan secara efektif dan efisien setiap masyarakat harus melaporkan hasil pemantauan tiap satu minggu satu kali melalui Whatsapp dan jika ditemukan jentik maka kader akan langsung memeriksa ke rumahnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Purwanto,E.A. dan Dyah Ratih Sulistyastuti.2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Medika.

Winarno. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta. CAPS.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Pemantauan Jentik Berkala. (2020) *Standar Operasional Prosedur Jumantik. Tasikmalaya* : Dinkes.

Marisca Octaviani Tanjung (2012). *Perilaku Kader Jumantik Dalam Pelaksanaan PSN DBD 3M Plus Di Kelurahan Jomlang Kecamatan Candisar*. Vol 1, No 2 Tahun 2012. Halaman 1061-1067.

Abdullah Ramdhani., Muhammad Ali Ramdhani 2017. “*Konsep Umum Kebijakan Publik*” Vol 11. No 01 2017. Halaman 1-12.

Tegar Lyana Pangestika., Kusyogo Cahyo., Besar Tirta., Priyadi Nugraha(2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Jumantik Dalam Sistem Kewaspadaan Dini Demam Berdarah Dengue Di Kelurahan Sendanfmulyo*. Vol 5. No 5 Oktober 2017 (ISSN 2346-3346).